

DISERTASI

**REKONSTRUKSI PENGATURAN SANKSI PIDANA BAGI
KORPORASI TERHADAP PELANGGARAN
ADMINISTRATIVE PENAL LAW DALAM RANGKA
PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA**

Diajukan untuk memenuhi persyaratan dalam rangka
memperoleh gelar Doktor Hukum



Prof. Dr. Elwi Danil, S.H., M.H. (PROMOTOR)
Dr. Wetria Fauzi, S.H., M. Hum. (CO PROMOTOR)
Dr. Nani Mulyati, S.H.M.CL (CO PROMOTOR)

**PROGRAM STUDI DOKTOR HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2025**

REKONSTRUKSI PENGATURAN SANKSI PIDANA BAGI KORPORASI TERHADAP PELANGGARAN *ADMINISTRATIVE PENAL LAW* DALAM RANGKA PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA

Feri Antoni Surbakti, 2030112008, Program Doktor Hukum,
Fakultas Hukum Universitas Andalas.

ABSTRAK

Korporasi sebagai subjek hukum dalam *administrative penal law* dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Penelitian ini berfokus pada tiga rumusan masalah yaitu: 1) bagaimanakah pengaturan sanksi pidana yang diterapkan kepada korporasi di dalam *administrative penal law*, 2) bagaimanakah pelaksanaan sanksi pidana (eksekusi) kepada korporasi dalam putusan pengadilan terkait dengan pelanggaran hukum pidana administratif dan 3) bagaimanakah rekonstruksi pengaturan sanksi pidana bagi korporasi ke depannya yang dapat diterapkan dalam *administrative penal law*. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif-empiris dengan melakukan beberapa pendekatan. Hasil dalam penelitian ini dapat dikemukakan bahwa pengaturan sanksi pidana bagi korporasi yang dirumuskan di dalam *administrative penal law* selama ini belum memberikan solusi yang terbaik guna memberikan efek jera dan mempengaruhi perilaku korporasi untuk mematuhi hukum. Pelaksanaan eksekusi sanksi pidana kepada korporasi sebagai terdakwa dalam berbagai putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terdapat kendala. Rekonstruksi terhadap pengaturan sanksi pidana bagi korporasi dalam *administrative penal law* guna menegakan kepatuhan hukum. Pengaturan sanksi pidana bagi korporasi terkait pelanggaran *administrative penal law* di dalam penggunaannya perlu batasi dengan menerapkan prinsip *ultimum remedium*. Sanksi yang diterapkan bagi korporasi tidak hanya bersifat pidana, namun juga meliputi sanksi tindakan. Sanksi pidana pokok bagi korporasi ke depannya dalam *administrative penal law* tidak hanya denda dan perlu disesuaikan dengan tingkat kebutuhan undang-undang yang mengaturnya. Penerapan pidana denda, harus dibarengi dengan pidana pengganti denda yang juga mencakup korporasi yang tidak dapat memenuhi denda dan tidak memiliki harta kekayaan. Beberapa bentuk pidana tambahan yang berlaku bagi korporasi harus memiliki konsekuensi hukum, apabila tidak dijalankan dan sanksi tindakan ke depannya dapat diterapkan secara bersamaan dengan pidana pokok berupa denda.

Kata kunci: *Rekonstruksi, Sanksi Pidana, Korporasi, Administrative penal law.*

RECONSTRUCTION OF CRIMINAL SANCTIONS REGULATION FOR CORPORATE IN VIOLATION OF ADMINISTRATIVE PENAL LAW IN THE CONTEXT OF PENAL REFORM

Feri Antoni Surbakti, 2030112008, Doctor of Law Program, Faculty of Law,
Andalas University.

ABSTRACT

Corporation as legal subjects in administrative penal law can be held criminally liable. This research focuses on three problem formulation, namely: 1) how to regulate criminal sanction applied to corporations in administrative penal law, 2) how to implement criminal sanction (execution) to corporation in court decisions related to violation of administrative penal law and 3) how to reconstruct criminal sanction regulation for corporations in the future that can be applied in administrative penal law. The research method use is normative-empirical juridical by taking several approaches. The result of this study can be stated that the regulation of criminal sanctions for corporations formulated in the administrative penal law has not provided the best solution to provide a deterrent effect and influence corporate behavior to comply with the law. The implementation of execution of criminal sanction to corporation as defendants in various decisions that have obtained permanent legal force, there are obstacles. Reconstruction of the regulation of criminal sanctions for corporation in administrative penal law to enforce legal compliance. The regulation of criminal sanctions for corporation related to violation of administrative penal law in its use need to be limited by applying the principle of *ultimum remedium*. the sanction applied to corporation are not only criminal, but also include action sanction. The main criminal sanction for corporation in the future in the administrative penal law is not only fines and need to be adjusted to the level of need of the law that regulates it. The application of fines must be accompanied by substitute criminal fines which also includes corporation that cannot pay fines and do not have asset. Several forms of additional criminal penalties that apply to corporation must have legal consequences, if not carried out and sanction for the future actions can applied simultaneously with the main crime in the form of fines.

Keywords: *Reconstruction, Criminal Sanctions, Corporation, Administrative penal law.*